

Konstruksi Pemberitaan Mediasi Karaton Kasunanan Surakarta

Abstrak

Penelitian ini fokus pada pemberitaan mengenai mediasi konflik Karaton Kasunanan Surakarta. Mediasi terjadi karena adanya penolakan hasil keputusan rekonsiliasi pada tahun 2012. Mediasi yang dilakukan ternyata tidak berhasil menyelesaikan konflik. Hal tersebut menunjukkan bahwa mediasi dalam konflik, membutuhkan beberapa elemen agar mediasi mampu mencapai tujuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis framing oleh Robert N. Entman. Analisis framing dipilih karena penelitian ini berkaitan dengan penyaringan informasi terhadap media. Temuan menunjukkan bahwa adanya penolakan Roy Suryo sebagai mediator konflik Karaton Kasunanan Surakarta, terjadi pelemahan budaya karaton pada pelaksanaan mediasi, dan timbulnya rasa ketidakpercayaan terhadap mediasi yang difasilitasi pemerintah.

Kata Kunci : Media Massa, Framing, Konflik, mediasi

Abstract

This study focused on reporting on conflict mediation Karaton Surakarta. Mediation occurs because of the rejection of the decision of reconciliation in 2012. However, the mediation

did not succeed in resolving the conflict. It shows that the mediation requires several elements to be able to achieve the goal. This study uses qualitative research methods by using the frame analysis as proposed by Robert N. Entman. Framing analysis is selected for this study because it relates to the filtering of information to the media. The findings suggest that the rejection of Roy Suryo as the conflict's mediator is because no trust from one of the conflicting party. Moreover, it also finds that there is a tendency to obey the culture in the mediation process.

Keywords : Mass Media, Framing, Conflict, mediation

PENDAHULUAN

Karaton Kasunana Surakarta berdiri pada tanggal 17 Februari 1945 di Desa Sala atau yang dikenal dengan Kota Solo. Wafatnya Paku Buwono XII pada tahun 2004 meninggalkan polemik yang membuat Karaton Kasunanan Surakarta mengalami konflik internal. Konflik terjadi karena PB XII tidak mempunyai permaisuri dan putera mahkota untuk menggantikan kekuasaannya sebagai raja. Oleh karena itu, ditetapkan dua kandidat raja dari putra tertua selir PB XII, yaitu KGPH Hangabehi dan KGPH Tedjowulan. Penetapan ini menimbulkan polemik yang menyebabkan terjadinya duaslime kepemimpinan di Karaton Kasunanan Surakarta (Liputan6.com, 2013).

Rekonsiliasi pada tanggal 16 Mei 2012 di Hotel Dharmawangsa dilakukan untuk menyelesaikan konflik dualisme raja tersebut. Dari rekonsiliasi ini menemui kesepakatan, yakni KGPH Hangabehi ditetapkan sebagai Raja dengan gelar S.I.S.K.S Paku Buwono XIII, sedangkan KGPH Tedjowulan ditetapkan sebagai Maha Patih Panembahan Agung (Solopos.com, 2014). Rekonsiliasi tersebut mendapatkan pertentangan dari GKR Wandansari atau Mbak Moeng yang mendirikan Lembaga Dewan Adat (Solopos.com, 2014).

Salah satu cara yang dilakukan Karaton Surakarta dalam menyelesaikan konflik dengan melibatkan mantan Presiden Susilo

Bambang Yudhoyono yang dianggap sebagai pihak netral. Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lalu menunjuk Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo sebagai mediator konflik. Hal ini terkait dengan latar belakang Roy Suryo yang masih keturunan Pakualaman merupakan Catur Sagatra, ialah pendiri Mataram Islam. Terkait dengan Roy Suryo sebagai mediator konflik, Humas Karaton Kasunanan Surakarta K.P Bambang Pradotonagoro menyatakan keterlibatan Roy Suryo sebagai mediator konflik merupakan dampak dari dilupakannya kesepakatan Rekonsiliasi 16 Mei 2012 yang dilakukan oleh sentana dalem yang mengakibatkan munculnya Dewan Adat (Solopos.com, 2014).

Namun penunjukkan Roy Suryo sebagai mediator konflik mendapat penolakan dari beberapa kerabat karaton. Seperti yang diungkapkan oleh adik ipar raja, KRMH Satriyo Hadinagoro yang menyatakan masalah karaton aneh bila diurus oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Dulu sudah benar diurus oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), sehingga ini suatu kemunduran (Solopos.com, 2014). Dari pernyataan tersebut dapat terlihat adanya ketidaksetujuan mengenai Roy Suryo sebagai mediator konflik Karaton Solo.

Saat ini konflik tidak bisa dihindari oleh organisasi dan cara untuk meminimalkan masalah yang akan timbul itu sangat penting dalam pengelolaan yang tepat. Dalam suatu organisasi, keberadaan konflik merupakan masalah yang sangat penting untuk segera diselesaikan (Fuller dan Rice, 2014, h. 328). Pada Karaton Solo, konflik yang terjadi tidak dapat dihindari jika terdapat pihak yang tidak setuju dengan hasil keputusan rekonsiliasi. Konflik yang terus menerus terjadi ini menimbulkan krisis dalam organisasi Karaton Solo. Tidak hanya itu, konflik Karaton Solo juga menjadi pemberitaan dalam media surat kabar, tidak terkecuali media lokal Kota Solo, yakni Solopos. Peningkatan berita mengenai

konflik merupakan ketidaksejalannya antara pihak yang terlibat dalam konflik yang diberitakan (Hasani, et al., 2014, h. 1017).

Pendefinisian konflik diambil dari bahasa latin, yakni '*com*' yang memiliki arti bersama-sama, dan juga '*figere*' yang mempunyai arti menyerang. Dari pendefinisian tersebut, konflik merupakan usaha yang dilakukan bersama-sama untuk saling menyerang. Konflik dapat terjadi ketika adanya perbedaan kepentingan yang saling bersimpangan dengan tujuan akhir masing-masing (Widiastuti, 2012, h. 149). Seperti yang terjadi pada Karaton Solo, konflik ini ditimbulkan karena adanya penolakan hasil keputusan rekonsiliasi yang terjadi dalam internal keluarga karaton.

Krisis bisa mengancam kelangsungan organisasi karena terjadi dengan tidak terduga. Apabila krisis terjadi, bisa menimbulkan kerugian bagi organisasi sehingga menuntut adanya penyelesaian secepatnya karena bisa mengganggu kinerja organisasi (Wolf dan Mejri, 2010, h. 49). Krisis pada Karaton Solo terjadi sudah sejak lama. Penyelesaian yang dilakukan oleh pihak karaton dan pemerintah daerah tidak dapat membuat krisis tersebut berakhir. Hal ini membuat pemerintah pusat turun tangan dalam menangani kasus ini.

Terjadinya krisis dapat merubah persepsi masyarakat menjadi negatif terhadap organisasi. Hal ini bisa berdampak pada rusaknya reputasi organisasi di mata *stakeholder* maupun publik atau masyarakat (Coombs, 2007, h. 165). Saat krisis terjadi, reputasi Karaton Kasunanan Surakarta menjadi terancam. Karaton Solo dianggap sebagai pemimpin, jika konflik internal tidak bisa di selesaikan sendiri hal ini menimbulkan pikiran negatif pada masyarakat.

Lerbinger dalam bukunya '*Facing Risk and Responsibility*', menjelaskan mengenai penanganan krisis merupakan hal yang harus segera diwujudkan untuk mempengaruhi siapa yang dinilai dan bagaimana tindakan penyelesaiannya (Heath, 2009, h. 9). Upaya

penyelesaian telah dilakukan oleh pihak Karaton Solo dan Pemerintah Daerah Kota Solo. Namun upaya ini belum bisa menyelesaikan konflik, sehingga pemerintah pusat turun tangan.

Komunikasi krisis sangat diperlukan apabila suatu organisasi mengalami situasi krisis. Komunikasi dilakukan sebagai bentuk respon dari krisis yang terjadi untuk bertanggungjawab kepada *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Kegagalan dalam mengelola krisis dapat menimbulkan bahaya yang serius, ketika organisasi mengalami kerugian bahkan bisa berakibat organisasi tersebut dapat berakhir. Untuk itu, manajemen krisis diperlukan untuk menyelesaikan krisis dan sangat penting bagi suatu organisasi (Wolf dan Mejri, 2010, h. 50). Langkah yang diambil oleh Karaton Solo untuk menyelesaikan konflik ini dengan melibatkan pemerintah pusat. Namun usaha rekonsiliasi yang telah dilakukan mendapat penolakan dari internal karaton.

Menurut Gray dalam Wolf dan Mejri (2010), komunikasi krisis terkait dengan pengelolaan hasil, dampak dan persepsi publik dari krisis. Ketika terjadi krisis, dibutuhkan komunikasi krisis yang digunakan untuk menyelesaikannya sehingga citra akan tetap menjadi baik (Wolf dan Mejri, 2010, h. 49). Dalam situasi krisis, organisasi publik atau swasta menjadi rentan. Ketika organisasi mengambil strategi diam, masyarakat mencari informasi di media massa yang menyebabkan atribusi tanggung jawab krisis. Pemberitaan konflik di media massa memerlukan penanganan khusus sebagai tindakan tanggung jawab dari berita yang ada di media massa seperti media berita harian maupun tabloid (Cmeciu, et al., 2015, h. 42). Media berperan penting dalam situasi krisis. Terutama berita di media massa, tidak terkecuali situs surat kabar harian media online di internet yang juga memiliki peranan sangat penting dalam masa krisis terjadi.

Solopos turut mengiringi jalannya proses

penyelesaian konflik pada Karaton Kasunanan Surakarta. Pemilihan berita pada surat kabar harian media online dikarenakan dalam perkembangan informasinya lebih cepat dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Solopos merupakan media lokal Solo. Unsur kedekatan geografis dan emosional merupakan faktor yang dianggap penting bagi masyarakat Kota Solo untuk mengetahui perkembangan konflik Karaton Solo. Solopos memiliki jangkauan yang cukup luas di Karesidenan Surakarta. Pemilihan periode pemberitaan tahun 2014 karena Solopos.com masih banyak memberitakan mengenai mediasi konflik.

Pemberitaan mengenai konflik Karaton Surakarta cukup menarik perhatian publik, terutama masyarakat disekitar Kota Solo. Konflik di Karaton Surakarta berbeda dibandingkan dengan organisasi lain karena itu adalah budaya organisasi yang berbasis masyarakat. Karaton memiliki hukum dan aturan yang berbeda sendiri. Karakteristik budaya yang ada di Karaton Surakarta berbeda dari organisasi lain. Mereka memiliki norma tertentu, etika, dan simbol, aturan yang mengatur perilaku mereka dan percaya. Sebagai keluarga kerajaan, mereka hidup dengan doktrin untuk mematuhi pemimpin untuk kebaikan. Mereka mengikuti tradisi yang sudah tertanam dalam hidup mereka (Purworini, 2016, h. 11).

Permasalahan yang terjadi, media tidak bisa bersifat netral. Ada atribut-atribut yang mengkondisikan pesan. Seperti yang diungkap oleh Mashall McLuhan, '*the medium is the message*', medium sendiri itu merupakan pesan. Apa yang dikatakan akan ditentukan oleh media itu sendiri. Budiman (1992) dalam Sobur (2006), pesan-pesan yang disalurkan oleh media mengandung muatan ideologis yang berpihak kepada kepentingan para penguasa (Sobur, 2006). Teks berita pada Solopos.com juga mengandung pesan yang sesuai dengan ideologinya sebagai media massa lokal.

Peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai penguat penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Camelia Cmeciu, Cristina Coman, Monica Pătruț, dan Fănel Teodorașcu tentang bayi baru lahir tewas pada kebakaran tahun 2010 di Giulesti Maternity Hospital di Bucharest. Penelitian ini berfokus pada ulasan berita mengenai krisis di empat surat kabar nasional. Hasil menunjukkan dari pemberitaan tersebut dapat ditemukan adanya atribusi tanggung jawab, *human interest*, konsekuensi ekonomi, konflik, dan moralitas (Cmeciu et al., 2015, h. 42). Peneliti melihat penggunaan framing tidak hanya untuk surat kabar cetak saja, namun bisa juga digunakan untuk surat kabar pada media online. Serta fokus penelitiannya yang berhubungan dengan organisasi.

Penelitian selanjutnya oleh Moch. Irsyad Mahlafi mengenai pemberitaan Rekonsiliasi Karaton Solo. Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana konstruksi realitas pesan yang ingin disampaikan tentang pemberitaan pada surat kabar Solopos mengenai rekonsiliasi Karaton Kasunanan Surakarta periode bulan Mei – Juni 2012. Penelitian ini menghasilkan pemberitaan mengenai rekonsiliasi terjadi karena konflik budaya. Terdapat temuan lainnya, seperti disharmonisasi budaya hubungan internal keluarga karaton, dekonstruksi budaya karaton, dan politisasi konflik karaton (Mahlafi, 2013, h. 3). Penelitian ini berfokus pada pemberitaan rekonsiliasi karaton, sedangkan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah pemberitaan mengenai mediasi Karaton Kasunanan Surakarta yang difasilitasi oleh pemerintah. Mediasi adalah proses penyelesaian lanjutan dari konflik Karaton Solo dimana hasil rekonsiliasi mendapatkan perlawanan dari pihak internal Karaton.

Penulis tertarik untuk meneliti tentang konstruksi pemberitaan pada harian surat kabar media online Solopos.com mengenai mediasi yang dilakukan oleh pemerintah pada

tahun 2014 dalam menyelesaikan konflik pada Karaton Kasunanan Surakarta. Konflik di Karaton Kasunanan Surakarta sudah terjadi sejak lama. Dikarenakan Raja Paku Buwono XII yang tidak meninggalkan permaisuri dan putera mahkota. Oleh karena itu terjadi konflik dualisme raja diantara putera tertua dari selir PB XII. Dualisme raja merupakan kepemimpinan yang dipimpin oleh dua orang raja. Sehingga pemerintah dan Karaton Solo melakukan rekonsiliasi pada tahun 2012 guna menyelesaikan permasalahan dualisme raja ini. Namun dari hasil rekonsiliasi terjadi adanya penolakan hasil keputusan rekonsiliasi yang mengakibatkan konflik belum bisa terselesaikan. Hal ini yang membuat konflik yang terjadi pada Karaton Solo menjadi krisis.

Solopos.com dipilih karena faktor kedekatan geografis dengan Karaton Kasunanan Surakarta. Seringnya Solopos.com memberitakan mengenai mediasi konflik karaton. Ditemukan ada 16 artikel berita mengenai mediasi konflik karaton. Sedangkan surat kabar lokal Solo yang lain, yakni seperti media surat kabar harian lokal kota Solo Joglosemar hanya memberitakan 2 berita mengenai mediasi karaton.

Analisis Framing oleh Robert N. Entman digunakan untuk mengetahui konstruksi berita mengenai mediasi Karaton Kasunanan Surakarta melalui pemberitaan di media online lokal Solopos.com. Fokus pada analisis framing oleh Entman ini ialah pada penyeleksian isu dan penonjolan aspek-aspek dari realitas atau isu yang terjadi. Framing digunakan untuk menonjolkan atau memberi penekanan pada aspek tertentu sesuai kepentingan media. Akibatnya hanya bagian tertentu saja yang lebih bermakna, lebih diperhatikan, dianggap penting, dan lebih mengena dalam pikiran khalayak (Mulyana dan Solatun, 2007).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah yang penulis tentukan ialah bagaimana konstruksi berita pada pemberitaan mediasi Karaton Kasunanan Surakarta oleh Solopos.com

periode tahun 2014 berdasarkan perangkat elemen framing oleh Robert N. Entman?.

Analisis framing merupakan suatu metode analisis media yang penelitiannya berasal dari teori konstruksi sosial yang terbilang masih baru. Teori framing memaparkan hasil dari realitas yang dibentuk oleh suatu media. Analisis framing merupakan salah satu metode analisis data yang digunakan untuk melihat bagaimana media massa seperti surat kabar ataupun televisi yang membingkai realitas untuk dimuat atau disiarkan sebagai berita (Herman dan Nurdiansa, 2010).

Studi tentang analisis framing telah berkembang selama beberapa dekade terakhir. Publik mengandalkan media massa untuk mendapatkan informasi mengenai peristiwa yang terjadi di kawasan lokal, nasional dan bahkan di internasional. Ketergantungan pada media penting untuk mengatasi berita sebagai dasar narasi dan interpretasi. Fokus pada satu aspek dari suatu peristiwa tertentu dan menyajikannya kepada publik, media telah membentuk suatu realitas baru yang telah di konstruksi sesuai dengan formatnya. Kontruksi realitas berperan dengan membuat aspek-aspek tertentu dari cerita agar lebih menonjol. Frame media berfungsi membujuk publik untuk berpikiran sama seperti apa yang diinginkan oleh media itu sendiri (Carter, 2013, h. 1).

Framing pada dasarnya melibatkan pilihan dan arti-penting. Frame memilih beberapa aspek dari realitas dan membuatnya lebih menonjol dalam teks, dengan cara seperti itu dapat untuk mengetahui definisi masalah, interpretasi kausal, evaluasi moral dan rekomendasi yang dijelaskan. Menurut Gamson (1992), biasanya frame mendiagnosa, mengevaluasi, dan menentukan titik penyelesaian (Entman, 1993, h. 52).

Peter L. Berger seorang Sosiolog Interpretatif, memperkenalkan konsep framing sebagai konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme memandang teks berita dan media yang dihasilkannya dengan cara mereka sendiri. Berger dan Thomas Luckman dalam

tesis utamanya menjelaskan manusia dan masyarakat merupakan hasil dari produk yang dialektis, produk dinamis, dan plural yang berjalan terus-menerus. Bagi Berger, realitas itu dibentuk dan dikonstruksi, tidak dibentuk dengan cara ilmiah, maupun tidak diturunkan secara langsung dari Tuhan (Eriyanto, 2002).

Berger dan Luckman juga menjelaskan realitas sosial dengan memisahkan pemahaman 'kenyataan' dan 'pengetahuan'. Realitas diartikan sebagai kualitas yang terdapat di dalam fakta-fakta yang diakui sebagai memiliki keberadaan (*being*) yang tidak tergantung kepada kehendak kita sendiri. Sedangkan pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata (*real*) dan memiliki karakteristik yang spesifik (Bungin, 2008).

Menurut Robert N. Entman, frame sebagai proses seleksi yang menafsirkan makna tertentu. Framing merupakan bagaimana cara memilih serta menentukan aspek tertentu dari situasi yang menafsirkan suatu makna. Penafsiran makna dimaknai melalui narasi pada teks yang mendefinisikan makna yang saling terkait dengan penentuan masalah, analisis penyebab masalah, evaluasi moral pada makna yang terlibat serta penyelesaian masalah (Azpiroz, 2014, h. 78).

Robert N. Entman merupakan ahli yang menempatkan dasar-dasar bagi analisis framing untuk studi isi media. Menurutnya, konsep framing digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Penyeleksian isu berhubungan dengan proses pemilihan fakta. Dari realitas yang kompleks dan beragam itu, aspek mana yang akan diseleksi untuk ditampilkan. Dari proses ini selalu terkandung di dalamnya ada bagian berita yang dimasukkan (*included*), tetapi ada juga berita yang dikeluarkan (*excluded*). Tidak semua aspek atau bagian dari isu dapat ditampilkan, wartawan memilih aspek tertentu dari suatu isu. Sedangkan penonjolan aspek tertentu dari suatu isu, ialah aspek yang berhubungan dengan

penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari suatu peristiwa atau isu tersebut dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis. Hal ini sangat berkaitan dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak (Eriyanto, 2002).

Entman mengungkapkan terdapat sebuah perangkat framing untuk mengetahui bagaimana pembingkain yang dilakukan oleh media, serta untuk mengetahui bagaimana sebuah peristiwa dimaknai dan ditandakan oleh wartawan. Ada empat elemen yang dibagi oleh Entman dari perangkat framing sebagai berikut: (Eriyanto, 2002).

001. *Define Problems* (Pendefinisian Masalah)

Elemen framing yang pertama kali dapat dilihat. Elemen ini merupakan *mater frame* atau bingkai yang paling utama yang menekankan bagaimana peristiwa dimaknai secara berbeda oleh wartawan, maka realitas yang terbentuk akan berbeda.

002. *Diagnose Causes* (Memperkirakan Penyebab Masalah)

Elemen framing yang membingkai siapa yang dianggap tokoh utama dari suatu peristiwa yang terjadi. Peristiwa dapat dipahami tergantung dari apa (*what*) dan siapa (*who*) yang dianggap menjadi sumber masalah. Karena itu, masalah yang dipahami secara berbeda membuat penyebab masalah secara tidak langsung juga akan dipahami secara berbeda juga.

003. *Make Moral Judgement* (Membuat Pilihan Moral)

Elemen framing yang dibuat untuk membenarkan atau memberikan argumentasi terhadap masalah yang dibuat. Ketika masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan, maka diperlukan adanya argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut.

004. *Treatment Recommendation* (Menekankan Penyelesaian)

Elemen yang dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan. Jalan mana yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian itu tergantung dari siapa dan apa yang dipandang sebagai penyebab masalah.

Elemen Framing Model Robert N. Entman	Unit Analisis
<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Bagaimana suatu peristiwa isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Masalah Atau Sumber Masalah)	Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah?
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Nilai moral yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendegitimasi suatu tindakan?
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah atau isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?

Sumber: (Eriyanto, 2002)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang bersifat interaktif (menggunakan penafsiran) yang melibatkan banyak metode, dalam menekankan masalah penelitiannya (Mulyana dan Solatun, 2007). Data yang digunakan merupakan data kualitatif. Dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang menggambarkan konstruksi realitas yang terjadi. Menggunakan analisis framing oleh Robert N. Entman yang merupakan pemberian pendefinisian masalah, memberikan penjelasan, mengevaluasi, serta merekomendasikan terhadap pemberitaan (Gaio, 2015, h. 453).

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang diperoleh dari sumber data pertama di lapangan (dokumentasi) (Mulyana dan Solatun, 2007). Data primer dalam penelitian ini adalah teks berita yang peneliti dapatkan dari surat kabar harian media online Solopos.com mengenai mediasi

konflik Karaton Kasunanan Surakarta selama periode tahun 2014. Peneliti menemukan 16 artikel berita mengenai mediasi Karaton Solo. Sedangkan data sekunder, ialah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder (Mulyana dan Solatun, 2007). Data sekunder yang digunakan ialah jurnal komunikasi dan buku-buku komunikasi yang dapat mendukung penelitian dan data sekunder yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti menggunakan metode observasi dan dokumentasi. Metode observasi merupakan metode penelitian dimana peneliti mengamati langsung objek yang diteliti. Sedangkan metode dokumentasi bertujuan untuk menggali data-data masa lampau secara sistematis dan objektif (Mulyana dan Solatun, 2007). Dokumentasi yang peneliti peroleh berasal dari pengumpulan data dan teori dari berbagai sumber, misalnya buku-buku, dan artikel berita pada surat kabar harian media online Solopos.com.

Objek penelitian ini adalah berita mediasi konflik Karaton Kasunanan Surakarta di surat kabar harian media online Solopos.com selama periode tahun 2014. Pemilihan tahun 2014 karena pada tahun tersebut mediasi yang difasilitasi oleh pemerintah dilakukan untuk menyelesaikan dan mendamaikan konflik Karaton Solo. Validitas data menggunakan metode analisis data triangulasi, yakni menganalisis jawaban subjek dengan meneliti kebenarannya dengan data empiris yang tersedia (Mulyana dan Solatun, 2007).

PEMBAHASAN

Peran media dalam krisis dapat menjadikan sumber informasi oleh publik. Publik akan mencari informasi lewat berita yang diterbitkan oleh media massa. Krisis yang terjadi di Karaton Kasunanan Surakarta merupakan dampak dari konflik yang belum dapat terselesaikan. Pemilihan informasi mengenai krisis di Karaton Solo yang dijadikan berita telah melewati proses

penyeleksian isu sesuai dengan karakteristik Solopos. Media massa memainkan peranan yang penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat setiap harinya. Media berfungsi sebagai penjaga gerbang. Media menentukan relevansi dan pentingnya kegiatan menurut media tertentu. Format di media ditentukan oleh media sendiri. Di setiap negara memiliki sistem pada media dan praktik jurnalistik yang berdampak pada isi berita. Media memiliki format dan karakteristik berdasarkan apa yang dikehendakinya. Apa yang dibaca, dilihat dan didengar melalui suatu media, merupakan hal yang sudah diubah sesuai dengan format media itu sendiri (Romenti dan Valentini, 2010, h. 383).

Konflik bisa diakhiri dengan jalan mediasi, mediasi merupakan jalan yang mempunyai tujuan dalam menyelesaikan konflik antara pihak yang bertentangan untuk mengakhiri konflik agar tidak mengganggu. Raymond dan Kegley (1985) menyatakan pendapatnya mengenai mediasi. Menurut mereka, kegiatan mediasi merupakan bentuk dari manajemen konflik dan resolusi konflik yang melibatkan pihak ketiga sebagai pihak yang membantu penyelesaian konflik. Tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga biasanya: mengatur agenda penyelesaian konflik, melakukan komunikasi diantara pihak yang berselisih, serta menjelaskan posisi dan kedudukan masing-masing pihak yang terlibat dalam mediasi. Menurut Moore (1986) dalam Vukovic (2014), mediasi merupakan penekanan sifat dari kelanjutan uraian dan proses perundingan. Pihak ketiga yang dapat diterima harus tidak memihak dan bersikap netral. Mediasi menyediakan pihak ketiga diantara pihak yang berselisih sebagai proses untuk mencapai penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak. Pihak ketiga mempunyai sifat yang netral agar dapat menyelesaikan konflik (Vukovic, 2014, h. 62). Mediasi dilakukan untuk menyelesaikan konflik pada Karaton Kasunanan Surakarta

karena kegagalan dari upaya rekonsiliasi. Dalam mediasi tersebut, penunjukkan Roy Suryo sebagai mediator yang menjadi pihak ketiga. Namun keberadaan Roy Suryo sebagai mediator tidak diterima oleh semua pihak.

Menurut Paul Watson, media massa menganut konsep kebenaran yang bukanlah kebenaran sejati, tetapi sesuatu yang dianggap masyarakat sebagai kebenaran. Kebenaran sendiri ditentukan oleh media massa. Untuk itu pembaca harus memiliki kemampuan untuk menyaring sebuah berita agar menemukan kebenaran yang mendekati (Sobur, 2006). Seperti krisis yang terjadi di Karaton Surakarta mendapatkan perhatian dari media lokal Kota Solo, yakni Solo Pos. Pada situs online Solopos.com, pemberitaan mengenai konflik ini diberitakan sebagai sumber informasi untuk masyarakat.

Solo Pos berdiri di atas ideologi bahwa konflik ini harus diselesaikan dengan kontrol pemerintah sejak situasi sudah dalam krisis. Terkait dengan masalah budaya, Solo Pos tidak terfokus pada aspek itu. Alih-alih menggambarkan pendekatan budaya yang sudah ada di teks, seperti aspek simbolik yang dapat dilihat di banyak kalimat dan juga gambar. Dalam budaya Indonesia, orang suka duduk di sebelah orang, yang ia merasa dekat, yang berarti mereka memiliki kedekatan satu sama lain. Dalam kalimat, Solo Pos menyebutkan bahwa Gusti Tedjo dekat Gusti Dipo, dan juga di satu meja dengan Walikota Rudy dan Menteri Roy. Ini juga menekankan bahwa pesan menggambarkan dalam teks didukung oleh fakta nyata (Purworini, 2016, h. 12).

Upaya manajemen konflik dengan melakukan mediasi dimana mediator atau pihak ketiga mulai mengenali konflik untuk mempengaruhi pihak yang berkonflik, memberikan perubahan pada konflik, mengatasi konflik yang terjadi dan merubah hubungan pada pihak yang berkonflik. Menurut Frazier, mediator penting dalam merumuskan solusi yang tidak terkait

dengan hukum dan sebagai pihak ketiga memberikan atau mengusulkan solusi untuk mengakhiri konflik. Mediasi merupakan proses komunikasi yang membantu penyelesaian konflik melalui peran seorang mediator. Zartman dan Touval menyatakan ketidaksetujuannya terhadap keberpihakan mediator dan netralitas sebagai syarat untuk mendefinisikan mediasi yang sederhana namun bisa berguna sebagai usaha dalam negosiasi oleh pihak ketiga untuk menemukan solusi konflik yang tidak bisa ditemukan sendiri oleh pihak yang berkonflik. Peran mediator dalam proses negosiasi tidak hanya menyelesaikan masalah, namun dibalik itu semua mereka memiliki kepentingan tersendiri (Vukovic, 2014, h. 63).

Penelitian ini dilakukan agar masyarakat, terutama keluarga karaton mengetahui bahwa media dapat mengkonstruksi sebuah realitas dari peristiwa yang terjadi agar menjadi pemberitaan yang sesuai dengan ideologinya dan juga agar lebih berhati-hati dalam menjelaskan atau memberikan informasi mengenai suatu peristiwa pada media. Berita yang dimuat oleh media merupakan hasil bentukan dari pengetahuan dan pikiran wartawan yang sudah diolah sesuai dengan kepentingan dan ideologi media. Dalam penelitian ini menggunakan analisis framing. Analisis framing digunakan untuk menganalisis atau mengkaji pembingkai realitas oleh media. Pembingkai merupakan proses konstruksi, yakni realitas dimaknai dan didekonstruksi dengan cara dan makna tertentu (Mulyana dan Solatun, 2007).

Analisis data yang digunakan merupakan analisis data pada dokumen berita yang penulis kumpulkan dari harian media online Solopos.com. Dalam pendokumentasiannya, diperoleh 16 berita mengenai mediasi karaton selama tahun 2014. Pemilihan tahun 2014 karena pada rentan waktu tersebut, Solopos.com sering memberitakan mengenai mediasi karaton. Dalam analisis berita ini ditemukan beberapa masalah:

1. Adanya penolakan Roy Suryo sebagai mediator konflik Karaton Kasunanan Surakarta

a. *Define Problems*

Pada tahun 2012, konflik dualisme raja menemui kesepakatan dengan menempatkan K.G.PH Hangabehi sebagai PB XIII, dan K.G.PH Tedjowulan sebagai Maha Patih. Namun kerabat karaton yang semula pendukung Hangabehi menolak rekonsiliasi dan membentuk lembaga baru, yaitu Lembaga Dewan Adat yang diketuai oleh G.K.R Wandansari atau Mbak Moeng.

Dalam teks yang disajikan oleh Solopos.com, menjelaskan kemunculan Roy Suryo sebagai mediator konflik terjadi karena adanya sentana dalem yang berusaha melupakan kesepakatan rekonsiliasi. Hal ini menyebabkan munculnya persoalan Dewan Adat, karena inilah mantan Presiden SBY menunjuk Roy Suryo sebagai mediator (Solopos.com, 2014).

Beberapa kerabat Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang bergabung dalam Lembaga Dewan Adat menganggap Roy Suryo tak mempunyai kapasitas mengurus konflik internal Karaton Kasunan Surakarta (Solopos.com, 2014).

Dalam teks diatas, terlihat adanya penolakan terhadap Roy Suryo sebagai mediator konflik. Penolakan berasal dari kerabat Karaton Kasunanan Surakarta yang menganggap Roy Suryo tidak mempunyai kapasitas sebagai mediator konflik.

Selain lewat teks berita, penolakan Roy Suryo sebagai mediator konflik juga dimunculkan dalam judul berita "Aneh, Masalah Karaton Kok Diurusi Menpora"... (Solopos.com, 2014). Judul tersebut merupakan kutipan ungkapan dari adik ipar Raja PB XIII, KRMH Satriyo Hadinagoro. Dengan adanya penggunaan judul dari kutipan yang diungkapkan oleh kerabat keluarga karaton, menunjukkan memang adanya ketidaksetujuan dan penolakan terhadap Roy Suryo sebagai mediator konflik. Selain itu juga, penolakan Roy Suryo ditampilkan dalam kutipan teks berita:

"Aneh kalau masalah keraton diurusi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga [Menpora]. Dulu sudah benar diurusi Menteri Dalam Negeri, sehingga ini suatu kemunduran," ungkap adik ipar raja Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat PB XIII, KRMH Satriyo Hadinagoro, saat memberi keterangan pers sesuai haul PB XII di Sasana Handrawina, Sabtu (22/2/2014) (Solopos.com, 2014).

Dari kutipan teks berita tersebut dapat terlihat bahwa pihak Karaton Solo sebenarnya sudah membenarkan tindakan penyelesaian konflik ini dengan penunjukkan Menteri Dalam Negeri sebagai mediator konflik. Namun, adanya Roy Suryo penunjukkan Roy Suryo sebagai mediator konflik, dianggap sebagai suatu kemunduran dari usaha pemerintah dalam melaksanakan mediasi konflik ini.

b. *Diagnose Causes*

Penolakan Roy Suryo sebagai mediator dilatarbelakangi karena dia bukan anggota internal keluarga Karaton Kasunanan Surakarta, melainkan keturunan dari Pura Pakualaman Karaton Jogjakarta (Solopos.com, 2014). Hal ini dianggap bahwa Roy Suryo tidak memahami dan mengetahui masalah yang sebenarnya di karaton sehingga penunjukkan Roy Suryo sebagai mediator ditolak oleh internal keluarga karaton.

Keterlibatan Roy Suryo sebagai mediator konflik Karaton Solo menuai protes. Kerabat Karaton Kasunana Surakarta Hadiningrat yang tergabung dalam Dewan Adat menilai kedatangan Roy hanya membicarakan soal mobil (Solopos.com, 2014).

Teks berita diatas dengan judul "Tak Ada Rekonsiliasi, Roy Suryo Cuma Bicara Mobil", Solopos.com memunculkan adanya penilaian oleh Dewan Adat. Adanya penggunaan judul dan kutipan teks yang menunjukkan bahwa keterlibatan Roy Suryo tidak mendapat persetujuan dari Dewan Adat. Selain itu, Solopos.com memperlihatkan dalam kutipan teks pemberitaannya bahwa Roy Suryo tidak memahami persoalan konflik yang terjadi di Karaton Kasunanan Surakarta karena saat

pertemuan Roy Suryo hanya membicarakan mengenai mobil milik PB X dan partai. Seperti pada kutipan teks berita:

Ketika itu, papar dia, Roy tengah mencari referensi mengenai mobil Phaeton Benz 1894 milik mendiang PB X. Sebab mobil yang saat ini berada di Belanda itu dipercaya sebagai mobil pertama di Indonesia. "Jadi ketika itu memang tidak ada pembicaraan soal rekonsiliasi," kata Puger (Solopos.com, 2014).

Namun kehadiran Roy Suryo dalam mediasi dianggap tidak membicarakan mengenai konflik, melainkan membahas persoalan Partai Demokrat. Ini menunjukkan adanya ketidaktepatan dalam pelaksanaan tugas sebagai mediator konflik Karaton Solo dalam menyelesaikan konflik yang seharusnya terjadi.

Sementara itu, dari kubu Lembaga Dewan Adat, K.P. Eddy Wirabhumi, mengakui pihaknya sempat bertatap muka dengan Roy Suryo. Hanya, dia mengklaim pertemuan itu sebatas konsolidasi partai. Roy, Eddy dan Mbak Moeng merupakan kader Partai Demokrat. "Lebih banyak *ngomong* masalah partai," ujarnya (Solopos.com, 2014).

c. *Make Moral Judgement*

Dari analisis peneliti pada teks berita Solopos.com mengenai pemberitaan mediasi konflik Karaton Solo, adanya pihak-pihak yang masih bersikukuh dalam mempertahankan kepentingan dan pendapatnya mengenai mediasi konflik Karaton Kasunanan Surakarta. Seperti yang ditunjukkan oleh pemerintah yang mengklaim telah turun tangan dalam penyelesaian konflik tersebut. Sama halnya seperti yang diungkapkan oleh kerabat Karaton Solo yang merasa tidak pernah diajak bicara mengenai persoalan konflik maupun mediasi. Seperti pada kutipan teks berita berikut:

Pemerintah pusat mengklaim telah turun tangan untuk menyelesaikan konflik di Karaton Solo itu. Para kerabat ini juga mengklaim tak pernah diajak bicara dalam mediasi yang dilakukan oleh Roy yang juga menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) (Solopos.com, 2014).

Namun tidak sejalan dengan kerabat Karaton Solo, Roy Suryo mengklaim bahwa dirinya telah berbicara dengan Dewan Adat. Ini ditampilkan oleh Solopos.com dalam artikel beritanya:

Roy Suryo saat ditemui wartawan di Solo, Jumat (21/2/2014), mengklaim telah berbicara dengan kedua pentolan kelompok yang menyebut diri Dewan Adat tersebut (Solopos.com, 2014).

Solopos.com dalam artikelnya menunjukkan adanya masing-masing pihak yang terlibat dalam mediasi konflik Karaton Solo yang mempertahankan pendapatnya. Adanya perbedaan pendapat ini menunjukkan penyelesaian konflik dengan cara mediasi tidak berlangsung dengan baik.

d. *Treatment Recommendation*

Dalam menyelesaikan permasalahan konflik karaton yang terjadi, pemerintah diharapkan dapat menyelesaikannya dengan baik. Salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghentikan konflik ini yakni menggelar pertemuan antara Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan PB XIII Hangabehi dan Maha Patih Tedjowulan. Pertemuan tersebut diharapkan dapat menyelesaikan konflik yang terjadi. Seperti yang diungkapkan oleh K.P Bambang Pradotonagaro dalam teks berita yang disajikan oleh Solopos.com:

"Tujuan bertemu dengan SBY itu merupakan bagian dari tahapan rekonsiliasi. Mungkin, pertemuan dengan SBY itu diharapkan pemerintah pusat langsung turun tangan dan betul-betul menyelesaikan konflik karaton. Proses rekonsiliasi konflik karaton ini berjalan cukup lama sejak pemerintahan SBY-Jusuf Kalla dan SBY-Budiono," tegasnya (Solopos.com, 2014).

Hal ini menunjukkan bahwa Solopos.com ingin menampilkan bagaimana pihak-pihak yang menolak Roy Suryo sebagai mediator. Pemilihan narasumber yang di pilih oleh Solopos.com sudah cukup menunjukkan bahwa adanya kerabat karaton yang tidak setuju dengan penunjukkan Roy Suryo sebagai mediator konflik.

Define Problems	Roy ditolak sebagai mediator konflik
Diagnose Causes	- Bukan dari internal keluarga karaton - Tidak mengetahui masalah yang sebenarnya
Make Moral Judgement	Internal keluarga karaton bersikukuh dengan pendapatnya
Treatment Recommendation	Pemerintah harus tetap melanjutkan rencana dalam mendamaikan konflik karaton

2. Adanya pelemahan terhadap budaya karaton dalam pelaksanaan mediasi

a. Define Problems

Dari analisis teks berita yang disajikan oleh Solopos.com mengenai mediasi yang dilakukan oleh Roy Suryo dan pemerintah sebagai fasilitator, terdapat temuan dari teks berita yang dianalisis mengenai pelemahan budaya. Hal ini bisa terjadi apabila membahas permasalahan yang berhubungan dengan karaton akan dikaitkan dengan aspek budaya.

Pelemahan budaya ini terjadi didalam pelaksanaan mediasi, karena adanya pihak-pihak yang tidak mengakui sepenuhnya keberadaan Dwi-Tunggal. Seperti pada teks berita yang berjudul "*Roy Suryo: Rekonsiliasi Karaton Solo Setelah Pilpres*", Roy Suryo mengungkapkan adanya pihak-pihak yang tidak mengakui keberadaan dwi - tunggal tersebut.

Ketika ditanya perwakilan keraton dalam rekonsiliasi tersebut, Roy mengaku belum mengetahui pasti. "Anggota keluarga besar karaton pro dwi-tunggal sebelumnya sempat bertemu Presiden. Begitu pula dengan yang tak mengakui keberadaan dwi-tunggal. Presiden sudah menangkap sinyal masing-masing kubu. Ini permasalahan waktu saja," ungkapnya (Solopos.com, 2014).

Dari analisis teks berita yang disajikan oleh Solopos.com dengan mengutip pernyataan Roy Suryo tersebut, terlihat adanya pelemahan kebudayaan di Karaton Kasunanan Surakarta. Hal ini ditujukan dengan adanya pihak-pihak yang tidak mengakui keberadaan Dwi-Tunggal.

b. Diagnose Causes

Pelemahan hakikat PB XIII sebagai Raja sudah dirasakan oleh PB XIII Hangabehi itu sendiri. Pada kutipan teks berita Solopos.com, memperlihatkan adanya pelemahan kekuasaan PB XIII sebagai Raja. Raja mengungkapkan pelemahan kekuasaannya pada Mantan Presiden SBY.

PB XIII menceritakan kebebasan dirinya sebagai sosok Raja terganggu karena sebagian besar wilayah Karaton Solo sudah dikuasai oleh Lembaga Dewan Adat Karaton yang dipimpin oleh adiknya sendiri yakni G.K.R. Wandansari atau Mbak Moeng (Solopos.com, 2014).

Sebagai seorang Raja, seharusnya tidak ada pihak lain yang dapat menguasai wilayah kekuasaan Raja. Dalam teks tersebut memperlihatkan adanya pihak lain yakni Lembaga Dewan Adat yang menguasai sebagian besar wilayah kekuasaan Raja sehingga Raja merasa terganggu. Hal ini juga menunjukkan adanya pelemahan hakikat PB XIII sebagai Raja Karaton Kasunanan Surakarta.

c. Make Moral Judgement

Pelemahan budaya yang terjadi dikarenakan adanya penurunan hakikat dari seorang Raja, yaitu sebagai pemimpin. Solopos.com dalam teks beritanya menyajikan pernyataan dari Roy Suryo yang menyebutkan:

Menurut Roy, Mbak Moeng telah mempersilakan PB XIII bertemu dengan Presiden. Namun, Mbak Moeng memberi syarat PB XIII harus datang sendiri di pertemuan itu. "Melihat kondisi kesehatan, Sinuhun harus tetap ditemani. Sinuhun mengalami kendala dalam berkomunikasi sehingga perlu ada yang menjelaskan maksud pembicaraannya. Nanti saya sendiri yang menemani saat bertemu Presiden," ucapnya (Solopos.com, 2014).

Dari kutipan teks tersebut menyebutkan bahwa "*Mbak Moeng mempersilakan PB XIII bertemu dengan Presiden*". Hal ini

menunjukkan adanya pelemahan hakikat PB XIII sebagai Raja. Hakikat Raja pada umumnya adalah semua keputusan ada di tangan seorang Raja. Namun pada teks tersebut memperlihatkan Raja di atur oleh pihak lain, yakni Mbak Moeng. Serta adanya surat dari PB XIII untuk Susilo Bambang Yudhoyono yang berisikan mengenai dirinya sebagai Raja merasa terganggu. Seperti yang dikutip dalam teks berita:

Surat bernomor 03/PBXIII/II/2014 tertanggal 23 Februari 2014 itu berisi pernyataan sikap dan permohonan perlindungan hukum serta bantuan keamanan atas kepemimpinan, kewibawaan, dan keselamatan diri S.I.S.K.S. Paku Buwono XIII dan keluarga besar Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Surat yang terdiri atas enam lembar itu ditandatangani Paku Buwono XIII dan berstempel beraksara Jawa. Salinan surat tersebut juga diterima *Solopos.com* lewat email, Kamis (6/3/2014) siang (*Solopos.com*, 2014).

Adanya surat tersebut menandakan bahwa PB XIII merasa dirinya sebagai seorang Raja terancam. Hal ini menunjukkan adanya pihak lain yang mencoba mengganggu posisi dirinya sebagai seorang Raja. Nilai moral yang dapat diambil dari pelemahan terhadap kebudayaan karaton yaitu Raja yang seharusnya dianggap sebagai pemimpin tertinggi pada kenyataannya tidak dianggap sebagai seorang Raja yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan atas wilayah kekuasaannya.

d. *Treatment Recommendation*

Dalam teks yang disajikan oleh *Solopos.com*, adanya pelemahan budaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mengakui sepenuhnya keberadaan PB XIII sebagai Raja karaton. Dalam teks tersebut, Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden Republik Indonesia pada saat itu, mengupayakan mengembalikan kekuasaan PB XIII Hangabehi sebagai Raja. Hal ini ditunjukkan oleh *Solopos.com* lewat judul teks berita.

- PB XIII Bertemu SBY, Otoritas Karaton Surakarta segera Kembali Tegak (*Solopos.com*, 2014).
- PB XIII Curhat ke Presiden, SBY Siap Bantu (*Solopos.com*, 2014).
- SBY Fokus Kembalikan PB XIII ke Singgasana (*Solopos.com*, 2014).
- SBY Selesaikan Konflik Karaton Tunggu Pemilu (*Solopos.com*, 2014).

Salah satu langkah yang dilakukan oleh PB XIII untuk menyelesaikan konflik didalam keluarga karaton dengan mengirim surat untuk SBY. Surat tersebut berisikan mengenai kekuasaannya yang terganggu oleh pihak lain. Sehingga pemerintah perlu melakukan upaya tindakan untuk mengembalikan fungsi dari seorang Raja. Pemerintah selaku fasilitator mediasi konflik, menjamin dengan mengakui otoritas tertinggi karaton ada pada PB XIII bukan pihak lain. Seperti yang dikutip dalam teks berita *Solopos.com*:

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), lanjut Roy, telah mengatakan bahwa rekonsiliasi ini diharapkan selesai setelah pemilu dan sebelum acara Jumenengan 25 Mei 2014 mendatang, Roy menambahkan, pemerintah memberikan jaminan secara tegas bahwa mengakui otoritas tertinggi Karaton Solo ada di bawah PB XIII (*Solopos.com*, 2014).

Ini menunjukkan bahwa pelemahan kekuasaan PB XIII Hangabehi sebagai Raja hanya dilakukan oleh pihak lain, sedangkan pemerintah mengakui PB XIII sebagai Raja dan pemegang otoritas tertinggi di Karaton Kasunanan Surakarta.

<i>Define Problems</i>	Pelemahan kebudayaan pada Karaton Kasunanan Surakarta
<i>Diagnose Causes</i>	- Adanya kekuasaan selain Raja PB XIII Hangabehi - Pelemahan PB XIII sebagai Raja Karaton Kasunanan Surakarta
<i>Make Moral Judgement</i>	Pengendalian seorang Raja sebagai pemimpin karaton
<i>Treatment Recommendation</i>	Pemerintah tetap fokus mengembalikan otoritas Raja

3. Adanya rasa ketidakpercayaan terhadap mediasi yang difasilitasi pemerintah

a. *Define Problems*

Dalam menjelaskan beberapa temuan dari teks berita di Solopos.com mengenai rekonsiliasi Karaton Kasunanan Surakarta, frame selanjutnya yang ditemukan oleh penulis yakni adanya rasa ketidakpercayaan mengenai mediasi. Dari teks berita Solopos.com mengenai mediasi, ditemukan adanya ketidakpercayaan dari eksternal keluarga karaton terhadap mediasi.

Solopos.com, SOLO — Kalangan DPRD Kota Solo melalui Ketua Y.F. Sukasno pesimistis dengan ikhtiar Presiden Bambang Susilo Yudhoyono (SBY) menyelesaikan konflik berkepanjangan di lingkungan Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Kubu Paku Buwono XIII enggan menanggapi pernyataan wakil rakyat itu (Solopos.com, 2014).

Dari kutipan teks berita tersebut terlihat adanya rasa ketidakpercayaan terhadap usaha Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyelesaikan konflik Karaton Solo. Selain itu, ketidakpercayaan juga di tunjukkan oleh Heri Priyatmoko yang merupakan Sejarawan Muda Kota Solo.

Sikap serupa Sukasno juga ditunjukkan sejarawan muda Kota Solo, Heri Priyatmoko. Menurutnya, langkah Presiden SBY turut berikhtiar menyelesaikan konflik berkepanjangan di lingkungan Karaton Solo sekadar melakukan pelarian irasional pada akhir masa jabatannya (Solopos.com, 2014).

b. *Diagnose Causes*

Temuan dari teks berita oleh Solopos.com, yakni adanya ketidakpercayaan yang berasal dari eksternal keluarga Karaton Kasunanan Surakarta. Dalam teks berita, ketidakpercayaan tersebut berasal dari Y.F. Sukasno selaku Ketua DPRD Kota Solo.

Solopos.com, SOLO — Ketua DPRD Solo Y.F. Sukasno menuding upaya Presiden Bambang Susilo Yudhoyono (SBY) menduga

konflik di lingkungan Karaton Solo dengan pendekatan kekuasaan bakal berdampak pada konflik yang berkepanjangan. Sebelumnya, Sukasno sejatinya juga membuktikan ketidakmampuan wakil rakyat Solo menyelesaikan konflik berkepanjangan di lingkungan Kasunanan Surakarta Hadiningrat itu (Solopos.com, 2014).

Dari kutipan teks tersebut, ditemukan adanya perbedaan pendapat mengenai keberhasilan SBY dalam menyelesaikan konflik. Sejalan dengan Sukasno, Heri Priyatmoko juga mengungkapkan untuk apa Mantan Presiden SBY mengurus konflik karaton yang dianggap sebagai masalah sepele.

“Kalau mau rasional, sebenarnya banyak masalah lain di Indonesia seperti korupsi, terorisme, dan kemiskinan yang lebih penting diselesaikan. Namun kenapa SBY mau menyempatkan diri pada problem ‘remeh temeh’ karaton?,” ujarnya saat berbincang dengan *Solopos.com*, Senin (Solopos.com, 2014).

c. *Moral Judgement*

Dari kutipan judul berita yang dimuat oleh Solopos.com “*Ketua DPRD Pesimistis, Kubu PB XIII Emoh Tanggapi*” (Solopos.com, 2014), terlihat adanya rasa ketidakpercayaan dari eksternal keluarga karaton tidak ditanggapi oleh kubu PB XIII Hangabehi. Sedangkan, Solopos.com menyajikan kutipan teks berita dari judul tersebut, kutipan tersebut berisi pernyataan dari Wali Kota Solo FX Rudy yang menyebutkan seharusnya kedua kubu yang berseteru seharusnya mematuhi mandat yang dari SBY selaku Presiden RI pada saat itu.

Menurut Rudy, kedua kubu berseteru harusnya patuh pada mandat yang diberikan SBY nantinya.

“Presiden *kan* pemimpin tertinggi. Apapun keputusannya harus ditaati,” ujarnya (Solopos.com, 2014).

d. *Treatment Recommendation*

Solopos.com menuliskan upaya bantuan yang dilakukan oleh Rudy selaku Wali Kota Solo. Upaya tersebut merupakan salah satu

bagian dari penyelesaian konflik. Diharapkan dengan adanya bantuan tersebut, pelestarian karaton sebagai cagar budaya tetap berlangsung.

Rudy menambahkan bantuan hibah kepada keraton bakal bergulir lagi pascakeputusan penyelesaian Presiden. Tahun ini, pihaknya telah menyiapkan dana Rp300 juta untuk pelestarian karaton sebagai cagar budaya. Sebagai informasi, beberapa tahun terakhir dana bantuan pemerintah tak cair lantaran konflik internal. "Tidak akan disalurkan sebelum ada kesepakatan rukun. Namun untuk biaya listrik tiap tahun tetap kami berikan," tandasnya (Solopos.com, 2014).

Solopos.com juga mempublikasikan pernyataan dari Sukasno yang memberikan solusi bagi penyelesaian konflik karaton.

Menurut Sukasno, akar persoalan konflik karaton itu sangat kompleks dan rumit. Tetapi, Sukasno menegaskan bukan berarti konflik itu tidak bisa diselesaikan. Dia berpendapat konflik karaton akan bisa diselesaikan dengan catatan harus mengetahui akar permasalahannya. Sukarno menyampaikan dua hal yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan konflik keraton itu, yakni penyelesaiannya membutuhkan waktu dan kesabaran (Solopos.com, 2014).

Define Problems	Ketidakpercayaan terhadap mediasi
Diagnose Causes	Eksternal keluarga karaton tidak percaya mediasi
Make Moral Judgement	Mematuhi mandat Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Treatment Recommendation	- Pemberian bantuan hibah - Penyelesaian dengan mengetahui akar masalahnya

SIMPULAN

Konflik yang terjadi di Karaton Kasunanan Surakarta merupakan permasalahan yang telah terjadi sejak lama. Adanya pihak yang menolak dengan hasil keputusan Rekonsiliasi tahun 2012 menimbulkan persoalan baru, yakni dengan munculnya Dewan Adat.

Penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan melakukan komunikasi yang transparansi (Han, 2010, h. 26). Komunikasi yang transparan antar pihak-pihak yang terlibat dapat menyelesaikan konflik yang terjadi di Karaton Solo.

Menurut Bercovitch dan Gartner (2009), mediasi merupakan proses sukarela. Sifat yang dimiliki mediator haruslah berimbang, bisa diterima oleh semua pihak yang berkonflik dan bisa mendapatkan kepercayaan dari pihak yang berkonflik. Netralisasi pada mediator merupakan hal yang penting. Maoz dan Terris juga menjelaskan bahwa mediator harus memiliki standar dalam menyelesaikan konflik. Mediator harus dapat dipercayai oleh semua pihak yang berkonflik, punya kompetensi dalam menyelesaikan konflik, serta memahami konflik yang sedang terjadi (Vukovic, 2014, h. 65). Mediasi merupakan salah satu proses dimana pihak ketiga mempengaruhi pihak yang berkonflik agar dapat menemukan jalan keluar dan menyelesaikan konflik (Wang, 2011, h. 607).

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah adanya penolakan Roy Suryo sebagai mediator konflik, adanya pelemahan terhadap budaya karaton dalam pelaksanaan mediasi, dan adanya rasa ketidakpercayaan terhadap mediasi yang difasilitasi pemerintah.

Aktor utama dalam konflik dianggap sebagai penyebab konflik terjadi (Anne dan Marie, 2010, h. 58). Pada konflik mediasi Karaton Solo, keberadaan Roy suryo dianggap sebagai suatu kemunduran dalam proses mediasi. Sehingga proses mediasi berlangsung dengan tidak semestinya dikarenakan adanya penolakan Roy Suryo sebagai mediator konflik yang dilakukan oleh Lembaga Dewan Adat. Roy Suryo dianggap tidak mempunyai kapasitas dalam penyelesaian konflik ini. Roy Suryo merupakan keturunan dari Paku Alaman yang merupakan Catur Sagatra, ialah pendiri Mataram Islam dari Karaton Yogyakarta. Hal ini dianggap bahwa Roy Suryo tidak mengetahui masalah yang sebenarnya terjadi didalam Karaton Solo. Sehingga terjadi

penolakan terhadap Roy Suryo sebagai mediator konflik.

Konflik mempunyai peran dalam permainan membangun suatu kepercayaan (Chen dan Ayoko, 2012, h. 27). Konflik yang terjadi dalam Karaton Solo dapat menjadi suatu permainan dalam membangun kepercayaan pemerintah daerah yang sempat hilang. Dari proses mediasi ini diharapkan mendapat kepercayaan dari pemerintah daerah kembali. Seringnya interaksi dan berkomunikasi antar anggota dapat menimbulkan kepercayaan yang lebih didalam organisasi (Han, 2010, h. 23). Ketidakpercayaan pemerintah daerah dengan proses mediasi ini dapat diminimalisirkan dengan adanya komunikasi dan interaksi antar pihak-pihak yang terlibat.

Solopos merupakan salah satu media surat kabar yang ada di Kota Solo. Kegunaan dari media ialah menginformasikan suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi dan dikemas dengan bentuk berita. Dalam pemberitaannya, media memiliki pesan tersendiri dalam berita yang dipublikasikannya. Hal ini dikarenakan media adalah pengantar pesan (Anne dan Marie, 2010, h. 53). Seperti yang terjadi pada Karaton Solo. Konflik yang terjadi di Karaton Solo menjadi konsumsi pihak media untuk pemberitaannya. Ini dilakukan agar masyarakat mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya yang terjadi.

Dari temuan tersebut, media online Solopos.com melakukan konstruksi berita pada pemberitaan mengenai mediasi dari pemerintah untuk menyelesaikan konflik Karaton Kasunanan Surakarta. Solopos.com merupakan surat kabar media online yang turut mengiringi jalannya proses mediasi. Pemberitaan mengenai mediasi digunakan Solopos untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa media ini dekat dengan karaton dan pemerintah Kota Solo. Hal ini digunakan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat.

Pemberitaan yang dilakukan oleh Solopos.com bertujuan memberikan informasi kepada

masyarakat bahwa pemerintah ikut andil dalam menyelesaikan konflik di Karaton Solo. Media Solopos.com sering memberitakan bagaimana usaha pemerintah dalam hal ini diwakilkan oleh Roy Suryo sebagai mediator konflik untuk menyelesaikan konflik karaton yang sudah lama terjadi.

Dari 16 artikel berita mengenai proses mediasi yang difasilitasi oleh pemerintah, kecenderungan Solopos.com dalam memberitakan mengenai mediasi konflik Karaton Solo lebih berpihak kepada pemerintah. Namun hal ini tidak diperlihatkan secara langsung dalam artikel beritanya. Pemilihan narasumber sebagai informan juga menunjukkan adanya kecenderungan memihak pemerintah, misalnya sering memunculkan narasumber dari pemerintah, yakni Roy Suryo.

Namun dalam penelitian ini terdapat keterbatasan, penelitian ini menggunakan hanya satu media massa lokal, yakni Solopos. Selain itu juga pada penelitian ini menggunakan harian media online, bukan media cetak. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya di harapkan menggunakan lebih dari satu media massa lokal maupun nasional yang berguna untuk menemukan perbedaan konstruksi berita mengenai topik permasalahan yang sama. Selain itu juga, pada penelitian selanjutnya bisa menggunakan analisis framing dari ahli selain Robert N. Entman.

Dalam pengelolaan pemberitaan, media surat kabar harian Solopos harus mempertahankan ideologinya untuk memproduksi dan mempublikasikan berita sesuai dengan fakta dan realita yang diberikan oleh narasumber. Karaton Surakarta harus teliti dalam memberikan informasi kepada media massa. Sikap ini diperlukan agar berita yang dipublikasikan sesuai dengan realitas yang sebenarnya.

Para pembaca diharapkan mampu memilih dan bersikap kritis terhadap surat kabar dan berita yang dibacanya. Hal ini dikarenakan media surat kabar harian melakukan konstruksi realitas sesuai dengan ideologi

yang dipertahankannya. Hal ini dilakukan agar berita yang dipublikasikan sesuai dengan tujuan dan ideologi surat kabar harian.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL:

- Anne, M., & Marie, N. (2010). THE COMMUNICATION PROCESS IN POST-CONFLICT PERIOD. *BULETIN S T I I N T J I F I C*, 1(1), 51 – 60.
- Ardiansyah, Arief Sofyan. (2012), Konstruksi Seksualitas Perempuan di Majalah Men's Health, *Jurnal Komunikator*, 4(1), 80-92
- Azpiroz, M. L. (2014). Framing and political discourse analysis: Bush's trip to Europe in 2005. *Observatorio*, 8(3), 75–96.
- Carter, M. J. (2013). The Hermeneutics of Frames and Framing: An Examination of the Media's Construction of Reality. *SAGE Open*, 3(2), 1–12. <http://doi.org/10.1177/2158244013487915>
- Chen, M. J., & Ayoko, O. B. (2012). Conflict and trust : the mediating effects of emotional arousal and self-conscious emotions. *International Journal of Conflict Management*, Vol. 23 No(1), 19–56. <http://doi.org/10.1108/10444061211199313>
- Cmeciu, C., Coman, C., Patrut, M., & Teodorascu, F. (2015). News media framing of preventable crisis clusters. Case study: Newborn babies killed in the fire at a romanian hospital. *Transylvanian Review of Administrative Sciences*, (44), 42–56.
- Coombs, W. T. (2007). Protecting organization reputations during a crisis: The development and application of situational crisis communication theory. *Corporate Reputation Review*, 10(3), 163–176. <http://doi.org/10.1057/palgrave.crr.1550049>
- Entman, R. N. (1993). Framing : Toward Clarification of A Fractured Paradigm. *Northwestern University*, 43(January). <http://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Fuller, R. P., & Rice, R. E. (2014). Lights, camera, conflict: Newspaper framing of the 2008 Screen Actors Guild negotiations. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 91(2), 326–343. <http://doi.org/10.1177/1077699014527455>
- Gaio, A. M. S. M. C. D. (2015). ANALISIS FRAMING ROBERT ENTMAN PADA PEMBERITAAN KONFLIK KPK VS POLRI DI VIVANEWS.CO.ID DAN DETIKNEWS.COM. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 4, No(3), 451–455.
- Han, G. H. (2010). Team identification, trust and conflict: a mediation model. *International Journal of Conflict Management*, Vol. 21 No(2001), 20 – 43. <http://doi.org/10.1108/10444061011016614>
- Hasani, K., Boroujerdi, S. S., Sheikhesmaeili, S., & Aeni, T. (2014). Identity of organizational conflict framework: Evaluating model factors based on demographic characteristics in Iran. *Journal of Industrial Engineering and Management*, 7(5), 1013–1036. <http://doi.org/10.3926/jiem.1061>
- Heath, R. L. and H. D. O. (2009). *Handbook of Risk*. Routledge. <http://doi.org/10.1007/978-94-007-1433-5>
- Herman, A., & Nurdiansa, J. (2010). Analisis Framing Pemberitaan Konflik Israel - Palestina dalam Harian Kompas dan Radar Sulteng. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 8, (Mei - Agustus 2010), 154–169.
- Mahlafi, M. I. (2013). REKONSILIASI KERATON DALAM KONSTRUKSI MEDIA (Studi Analisis Framing Pada Kasus Rekonsiliasi Keraton Kasunanan Surakarta Dalam Surat Kabar Solopos Edisi Bulan Mei – Juni 2012). *Jurusan Ilmu Komunikasi*, 1 – 12.
- Purworini, D. (2016). The Pursuing of Government Policy: How Online Newspaper Frames the Internal Conflict in Karaton Surakarta, 3(PB XIII), 1 – 15.
- Romenti, S., & Valentini, C. (2010). Alitalia's crisis in the media – a situational analysis. *Corporate Communications: An International Journal*, 15(4), 380–396. <http://doi.org/10.1108/13563281011085493>
- Vukovic, S. (2014). International mediation as a distinct form of conflict management, 25(1), 61–80. <http://doi.org/10.1108/IJCMA-02-2012-0015>
- Wang, J. (2011). The mediation role of trust in knowledge sharing architectural design teams, (71202101). <http://doi.org/10.1108/ECAM-05-2011-0044>
- Widiastuti, T. (2012). Sebuah konflik antarbudaya di media. *Journal Communication Spectrum*, Vol. 1 No., 147–170.
- Wolf, D. De, & Mejri, M. (2010). Case study crisis communication failures : The BP case study. *International Journal of Advances in Management and Economics*, 2(2), 48–56. Retrieved from <http://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/165989/1/BP-CRISIS-IJAME.pdf>

BUKU:

- Bungin, B. (2008). *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi, dan Keputusan Konsumen Serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckman*. Jakarta: Kencana.

-
- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing*. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta.
- Mulyana, D., dan Solatun. (2007). *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sobur, A. (2006). *ANALISIS TEKS MEDIA Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.

WEBSITE:

www.solopos.com

www.liputan6.com

